

## **ABSTRAK**

### **FRIEN JONES IVEN H. TAMBUN**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang. Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini ketentuan pernyataan pailit terhadap yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, akibat hukum atas dinyatakannya pailit seseorang terhadap semua harta kekayaan dan tanggungan hutangnya serta pertimbangan hakim atas permohonan pernyataan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Ketentuan pernyataan PAILIT yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat – syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila syarat – syarat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum atas dinyatakannya pailit seseorang terhadap semua harta kekayaan dan tanggungan hutangnya, dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta kekayaannya. Pertimbangan hakim atas permohonan pernyataan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Indo Bangun Investama tersebut harus ditolak. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Kata Kunci : Pernyataan Pailit, Hutang, Jatuh Tempo

## **ABSTRACT**

### **FRIEN JONES IVEN H. TAMBUN**

Bankruptcy is a general confiscation of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement are carried out by a curator under the supervision of a supervisory judge as stipulated in the law. If a debtor only has one creditor and the debtor does not pay his debts voluntarily, the creditor will sue the debtor in a civil manner to the competent District Court and all of the debtor's assets will become the source of repayment of his debt to the creditor.

The problem in this study is the provisions regarding bankruptcy declarations which are justified in laws and regulations, the legal consequences of declaring a person bankrupt for all of his assets and debts and the judge's consideration of the request for pallt in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 565 K/Pdt.Sus- Bankrupt / 2022.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It was concluded that the provisions of the bankruptcy statement are justified in laws and regulations. A person or a legal entity wishing to apply for a declaration of bankruptcy must first know the conditions that must be met. If these conditions do not meet the specified conditions, then the application for a declaration of bankruptcy will not be granted by the Commercial Court. The legal consequences of a person's bankruptcy being declared against all of his assets and dependents on his debts, with the imposition of a bankruptcy decision, have an impact on the debtor and his assets. The judge's consideration of the request for pallt in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 565 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2022, the cassation request submitted by the Appellant for Cassation PT Indo Bangun Investama must be rejected. Whereas because the plaintiff's cassation request was previously rejected, the plaintiff's cassation petition must be punished to pay court costs at this cassation level.

Keywords: Bankruptcy Statement, Debt, Maturity